

45/HD/96

**PERANAN ADAT MINANGKABAU
DALAM PEMBANGUNAN**



Oleh

Drs. Karjuni Dt. Maani

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(IKIP) PADANG**

1992

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

PERANAN ADAT MINANGKABAU
DALAM PEMBANGUNAN

Oleh : Drs. Karjuni Dt. Maani

I. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional, pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan yang demikian pemerintah telah melaksanakan pembangunan secara berencana dan terarah dengan melalui beberapa tahap pembangunan lima tahun (Pelita). Pada saat ini tahap Pelita lima pada pembangunan jangka panjang tahap I hampir selesai, beberapa tahap Pelita yang telah dilalui tersebut, telah menghasilkan banyak perbaikan dan kemajuan, dan dari keadaan itu akan kita masuki pula pembangunan jangka panjang tahap II.

Sudah merupakan kebenaran, bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan antara lain ditentukan oleh kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan. Kualitas sumber daya manusia ini amat ditentukan oleh kemantapan dan tingkat kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, serta partisipasinya dalam menerapkan-

*) Disampaikan pada Musyawarah Pembangunan Nagari Gunung Rajo, pada tanggal 4 Mei 1992. ✓

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk melaksanakan proses pembangunan.

Disamping itu agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka penggalian nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah Bangsa Indonesia, perlu dilakukan untuk memperoleh nilai-nilai yang relevan untuk dapat disumbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga proses pembangunan tersebut betul-betul sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Kekayaan budaya bangsa yang kita miliki merupakan salah satu potensi yang sangat besar yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal dasar pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (BP-7 Pusat, 1990, hal. 97). ✓

Sehubungan dengan itu pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu bahagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia, melalui peraturan daerah No. 12 tahun 1978 tentang Pola Dasar Pembangunan lima tahun untuk Daerah Tk I Sumatera Barat, menyebutkan bahwa kebijaksanaan pembangunan di Daerah Tk I Sumatera Barat didasarkan kepada Sapta Karya Pembangunan yaitu :

- 1) Melaksanakan pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat

- 2) Mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- 3) Memelihara dan meningkatkan stabilitas nasional
- 4) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pembinaan moral dan akhlak
- 5) Memajukan kesejahteraan rakyat
- 6) Membina keharmonisan tata kehidupan berdasarkan alur dan patut
- 7) Meningkatkan partisipasi ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, wanita, generasi muda, dan seluruh lapisan masyarakat disegala bidang pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat yang didasarkan pada Sapta Karya Pembangunan, antara lain seperti yang disebut dalam angka enam dan tujuh di atas, yaitu membina keharmonisan tata kehidupan berdasarkan alur dan patut, dan meningkatkan peranan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, generasi muda, wanita dan seluruh lapisan masyarakat disegala bidang pembangunan, maka berarti peranan adat minangkabau sebagai kaedah sosial di daerah Tk I Sumatera Barat diharapkan pula peranannya. Karena adat Minangkabau menjiwai setiap kegiatan dan aktivitas masyarakat dalam kehidupannya (Rasyid Manggis, 1982, hal. 151).

Lebih lanjut Idrus Hakimy (1978, hal. 16) mengemukakan bahwa adat Minangkabau merupakan kekuatan dan modal dalam pembangunan. Untuk mencari masukan tentang usaha pembangunan yang akan dilaksanakan, maka melalui

Musyawarah Pembangunan Nagari (MPN) ini, kita akan membahas peranan adat Minangkabau dalam pembangunan. Hal ini perlu kita kaji dan selidiki kembali, karena bila kita perhatikan perkembangan dalam masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) dewasa ini terlihat mengaburnya penghayatan dan pengamalan ajaran adat Minangkabau ditengah-tengah masyarakat. Bersamaan dengan itu terlihat pula adanya kecenderungan yang besar dari anggota masyarakat untuk merobah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran adatnya sendiri dengan nilai-nilai yang bersumber dari luar masyarakat Minangkabau (kebudayaan asing), yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya.

Disamping itu kalau kita perhatikan masalah-masalah yang timbul akhir-akhir ini, terutama yang menyangkut dengan perkara adat banyak yang ditimbulkan oleh aparat adat itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa ajaran adat Minangkabau dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sudah banyak tidak diketahui, apalagi untuk dihayati dan diamalkan oleh sebahagian besar masyarakat sebagaimana mestinya, terutama sekali oleh para ninik mamak selaku pemangku adat dan pemimpin dalam masyarakat.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dengan segala masalah yang ditimbulkannya, maka melalui musya-

warah pembangunan nagari Gunung Rajo ini, mari kita coba mengungkapkan nilai-nilai ajaran adat Minangkabau yang masih menunjang pelaksanaan proses pembangunan. Karena kita menyadari bahwa pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah kita sekarang ini, membutuhkan nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari bumi Indonesia sendiri, agar hasil pembangunan tersebut betul-betul sesuai dengan kepribadian bangsa kita.

II. Permasalahan

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini adalah sejauh mana ajaran adat Minangkabau berperan serta dalam membantu mempercepat proses pembangunan di Sumatera Barat sekarang ini.

III. Pembahasan

Bila kita lihat peranan ajaran adat Minangkabau dalam perkembangan yang dialami masyarakat sekarang ini, memang terlihat suatu kecenderungan makin menipisnya peranan atau pengaruh ajaran adat sebagai kaedah sosial masyarakat. Hal ini terutama sekali disebabkan oleh karena kurangnya penghayatan dan pengamalan ajaran adat tersebut oleh masyarakat terutama oleh ninik mamak selaku pemangku adat. Kemudian kenyataan tersebut

dipengaruhi pula oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang tidak dapat pula kita hindari, misalnya dengan lancarnya transportasi dan komunikasi, sehingga anak kemenakan banyak yang merantau, menipisnya rasa tanggung jawab ninik mamak terhadap kemenakannya, harta pusaka tidak lagi merupakan sumber hidup mutlak dari suatu kaum dan pengaruh kebudayaan asing yang telah masuk kedalam nagari menimbulkan efek berkurangnya fungsi nilai-nilai adat yang telah kita miliki selama ini (N.M Rangkoto, 1979, hal. 23-25). Tetapi sebenarnya faktor-faktor ini pengaruhnya tidaklah begitu dominan terhadap menipisnya peranan adat Minangkabau tersebut, karena adat Minangkabau itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah :

Adat dipakai baru, kain dipakai usang
 Lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dibarui
 Sakali aia gadang, sakali tapian baranjak
 Sakali musim batuka, sakali caro baganti.

Sesuai dengan sifat adat yang demikian jelaslah bagi kita bahwa adat Minangkabau tidak menolak pembaharuan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, bahkan sebaliknya ia dapat seiring dan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi pada hakekatnya selama orang Minangkabau mampu menghaya-

ti ajaran adat tersebut perubahan bagaimanapun yang dialami oleh masyarakat tidak akan melumpuhkan peranan adat Minangkabau itu sebagai pandangan hidup dan kaedah sosial masyarakat. Tetapi karena penghayatan masyarakat Minangkabau kurang terhadap nilai-nilai dan ajaran yang dikandung oleh adat tersebut maka terjadilah ungkapan:

Urang manjarek tengah sawah
Kanailah anak buruang nuri
Dilieik lipek tak barubah
Kirolah tabuak tiok ragi

Akibatnya seolah-olah adat Minangkabau itu menolak perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, hanya saja kita yang kurang menghayati dan mengamalkan ajaran adat itu (Hasan Basri Durin, 1984, hal. 105).

Kembali kepada permasalahan tentang peranan adat Minangkabau dalam menunjang proses pembangunan di Sumatera Barat. Masih dapat kita lihat bahwa prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran adat Minangkabau masih mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dengan prinsip adat bersandi syarak (agama Islam) dan prinsip budi yang merupakan hakekat dari ajaran adat tersebut, dimana adat Minangkabau berperan dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, yang mempunyai budi pekerti yang luhur serta mempunyai dedikasi dan disiplin yang kuat, karena masalah budi meru-

pakan taruhan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional (M. Rasyid Manggis, 1982, hal. 147).

Selanjutnya adat Minangkabau berperan pula dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Dengan prinsip ini adat telah membantu pemerintah menghimpun segala kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang terdapat dalam masyarakat sebagai salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, misalnya saja pada setiap kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah, telah dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergotong royong. Ini telah diakui oleh pemerintah, sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas sewaktu menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan RAPBD propinsi daerah Tk I Sumatera Barat pada tahun 1985 didepan sidang pleno DPRD Tk I Sumatera Barat, antara lain beliau mengatakan:

Keberhasilan pembangunan selama ini didaerah Sumatera Barat, tidak hanya disebabkan karena usaha-usaha pemerintah daerah saja, tetapi juga dari partisipasi seluruh masyarakat didaerah ini. Hal ini berkaitan erat dengan sturuktur masyarakat daerah Sumatera Barat, yang berdasarkan jiwa kekeluargaan dan gontong royong yang cukup tinggi, dengan prinsip saciok bak ayam, sa danciang bak basi, ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang.

Kemudian melalui prinsip musyawarah (mufakat) adat Minangkabau telah berperan pula dalam memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi oleh pemerintah Sumatera Barat.

Misalnya ninik mamak yang mengamalkan ajaran adat Minangkabau telah membantu pemerintah dalam mengatasi kesulitan dalam mendapatkan tanah-tanah untuk sarana pembangunan. Misalnya tanah untuk pembangunan gedung-gedung sekolah, puskesmas dan areal perkebunan, tanpa ajaran adat yang dipahami oleh oleh ninik mamak maka masalah atau kesulitan ini akan sulit diatasi oleh pemerintah. Jadi ajaran adat Minangkabau banyak mengandung nilai-nilai positif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi tuntutan pembangunan.

Dalam mencapai tujuan pembangunan kita membutuhkan nilai-nilai yang datang dari luar (kebudayaan asing) untuk membantu kelancaran proses pembangunan. Disini adat Minangkabau berperan sebagai penyaring nilai-nilai yang datang dari luar tersebut, apakah cocok atau sesuai dengan kepribadian yang kita miliki.

IV. Kesimpulan

Dari uraian di atas, kelihatan oleh kita bahwa adat Minangkabau sebagai kaedah sosial dalam masyarakat di daerah Sumatera Barat mempunyai peranan yang besar dalam membantu kelancaran proses pembangunan di daerah Sumatera Barat. Diantaranya adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai budi pekerti yang luhur, menumbuhkan sikap gotong royong dan jiwa kekelu-

argaan, memperkuat kepribadian dan mempertebal rasa harga diri, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu adat Minangkabau juga berperan untuk menanggulangi pengaruh-pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedangkan dilain pihak berusaha menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.

Dalam kenyataan yang demikian, juga terlihat kecenderungan menipisnya peranan adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat sebagai kaedah sosial dan pandangan hidup. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya pemahaman dan penghayatan ajaran adat Minangkabau oleh masyarakat, terutama sekali oleh ninik mamak selaku pemangku adat.

V. Saran-saran

Menyadari betapa pentingnya peranan dan bantuan adat Minangkabau dalam mempercepat proses pembangunan di daerah kita ini, maka perlu dilakukan usaha-usaha pewarisan dan pengembangan ajaran adat Minangkabau kepada generasi-generasi yang akan datang, dengan melalui usaha-usaha sebagai berikut :

- 1) Menetapkan adat Minangkabau sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah di seluruh Sumatera Barat, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Keperguruan Tinggi, sehingga dengan demikian generasi muda Sumatera Barat dapat mewarisi nilai-nilai positif yang terkandung dalam ajaran adat Minangkabau, dalam mewujudkan manusia-manusia yang mempunyai budi pekerti yang luhur.
- 2) Mendirikan suatu lembaga penelitian dan pengembangan ajaran adat Minangkabau, yang dibiayai dan disponsori oleh pemerintah, sehingga menimbulkan semangat dan gairah bagi masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari seluk beluk tentang adat Minangkabau pada masa-masa mendatang.
- 3) Meningkatkan peranan dan pengetahuan ninik mamak dalam memelihara ajaran adat Minangkabau dimasa yang akan datang, sehingga mereka mempunyai wawasan pengetahuan yang luas dalam melihat dan menilai masalah dan perkembangan secara profesional dan tepat.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan peranan adat Minangkabau dalam membantu kelancaran proses pembangunan.

Pucuak sitapo aka manyulai, batang limpato dipatahkan,
bukan to ambo cadiak pandai, pusako kito sambahkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- BP-7 Pusat, (1990). Garis-garis Besar Haluan Negara; Jakarta; Sekretariat Negara.
- DPRD Tk I Sumatera Barat, (1978). Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1978.
- _____, (1984). Pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Daerah Tk I Sumatera Barat tahun 1984-1985.
- Durin, Basri, Hasan, (1984). Berbagai Masalah dalam Pewarisan dan Pengembangan Adat Minangkabau; Padang; LKAAM Sumatera Barat.
- Hakymi, Idrus, (1978). Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau; Bandung; Remadja Karya.
- Manggis, Rasyid, M, (1982). Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya; Jakarta; Mutiara.
- Rangkoto, N.M, (1979). Hubungan Mamak dan Kemenakan Dahulu dan Sekarang; Bukittinggi; Lestari.